



DIRELOKASI: Nampak dari kejauhan permukiman penduduk yang diterjang longsor di wilayah Blembem, Candirejo, Semin.

Enam Rumah di Candirejo Akan Direlokasi

Hunian Sementara Menempati Bekas Gedung Sekolah

GUNUNGKIDUL, Radar Jogja - Enam rumah yang terkena dampak longsor di Blembem, Candirejo, Semin beberapa waktu lalu, akan direlokasi. Untuk sementara, Pemkab Gunungkidul menyiapkan hunian sementara bagi keluarga terdampak.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Asti Wijayanti mengatakan, berdasarkan pendataan tercatat ada enam rumah rusak berat dan tidak layak huni. "Sudah dilaporkan lurah Candirejo, ada warga yang rumahnya betul-betul tidak bisa digunakan dan tidak mungkin balik ke lokasi asal, karena berbahaya. Jumlahnya ada 6," kata Asti Wijayanti kemarin (23/11).

Relokasi enam rumah tersebut menindaklanjuti arahan dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat berkunjung ke lokasi longsor belum lama ini. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan terkait dengan lahan relokasi. "Kami upayakan untuk relokasi karena permintaan menteri sosial, bahwa pemkab untuk menyediakan tempat relokasi enam rumah tersebut," ujarnya.

Progresnya, sementara ini baru mencari tanah. Sebesar mungkin, lokasi relokasi masih dalam satu wilayah Kapanewon Candirejo. Oleh sebab itu, disos intens berkoordinasi dengan Panewu Semin dan pemkal dan dukuh. "Kami menyiapkan tempat tinggal sementara. Kemarin alternatif bangunan SD depan kalurahan kosong karena regrouping. Sehingga bisa jadi tempat tinggal sementara," ucapnya.

Teknisnya, mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Gunungkidul ini menyampai-

Kami menyiapkan tempat tinggal sementara. Kemarin alternatif bangunan SD depan kalurahan kosong karena regrouping. Sehingga bisa jadi tempat tinggal sementara."

ASTI WIJAYANTI

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul

kan, persiapan tinggal di lokasi hunian sementara bakal difasilitasi oleh pemerintah. "Insha Allah, akan difasilitasi, karena kalau bantuan sudah sangat banyak," ungkapnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul Purwono mengatakan, lokasi tempat tinggal ahli waris masuk zona merah longsor. "Hasil koordinasi di lapangan ada arahan untuk memindahkan rumah warga ke tempat yang lebih aman," kata Purwono.

Kapan relokasi terealisasi? Menurutnya, masih harus dilakukan koordinasi lanjutan, baik dengan pemerintah kalurahan dan kemensos. Hal ini menyangkut dengan masalah tempat relokasi maupun pembiayaan pembangunan rumah tempat tinggal baru.

"Makanya masih butuh koordinasi lanjutan. Mungkin bisa tanahnya diadakan kalurahan atau pemkab, sedangkan yang pembangunan oleh kemensos. Bisa juga tanahnya oleh kalurahan, sedang bangunnya dari pemkab," ungkapnya. (**gun/din/by**)



TANGGAP BENCANA

DITETAPKAN: Rapat Paripurna (Rapur) penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 bersama Pj Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana di Ruang Krisna Kompleks DPRD Kulonprogo, Kamis (17/11).



DOK HUMAS DPRD KP

DPRD Kulon Progo Siap Bentuk Tujuh Perda di 2023

Fokus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

DPRD Kulonprogo sudah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna di Ruang Kresna, Kamis (17/11). Para wakil rakyat ini akan menyelesaikan tujuh Peraturan Daerah (Perda) di tahun 2023.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kulon Progo Agung Raharja mengatakan, tujuh perda yang akan dibentuk tahun 2023 terdiri dari tiga Perda wajib rutin yakni tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kulon Progo TA 2022, tentang Perubahan APBD TA 2023 serta tentang APBD TA 2024. "Empat Perda sisanya terdiri dari tiga Perda usulan eksekutif dan satu Perda inisiatif legislatif. Satu perda inisiatif DPRD Kulon Progo yakni Perda tentang Penyediaan Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan," ucapnya, kemarin (22/11).

Dijelaskan, tiga Perda usulan Pemkab Kulon Progo diantaranya Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa dan Perda tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomu-

nikasi. Namun, Biro Hukum DIJ menyarankan agar Perda tentang Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi diubah judulnya disesuaikan dengan PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran.

"Perubahannya belum dikirim ke DPRD Kulon Progo namun disarankan untuk mengatur dengan lingkup yang lebih luas, berupa penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi," jelasnya.

Menurutnya, dari tujuh Perda yang bakal dibuat di tahun 2023, ada satu perda yang membutuhkan pembahasan lama yakni Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Diperdiksi, pembahasan Perda ini membutuhkan waktu setengah tahun. "Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini memiliki tingkat kesulitan tinggi. Kami akan menggunakan waktu enam bulan pertama di tahun 2023 untuk membahas regulasi ini, kemudian setelah selesai baru dilanjutkan perda lainnya," ujarnya. (***/tom/by**)



60 Tenant TM 1 Terima Pelatihan dan Pendampingan Entrepreneurship

Agar Mindset Pengembangan dan Pembiayaan Bisnis Berubah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) DIY memberikan pelatihan dan pendampingan *entrepreneurship* kepada 60 *tenant* di Teras Malioboro (TM) 1. Tujuannya, adalah agar mereka bisa naik kelas dalam pengelolaan bisnis.

KEPALA Balai Layanan Bisnis UKM Dinas Koperasi dan UKM DIY Hellen Phornica mengatakan, sasaran *tenant* dalam kegiatan tersebut meliputi bidang fesyen, *craft*, dan aksesoris. Pelatihan yang dilakukan selama tiga hari itu, untuk mengubah *mindset* yang berkaitan dengan pengembangan bisnis maupun pembiayaannya.

Ada tiga materi pelatihan yang diberikan. Dari pengenalan *entrepreneurship*, *digital marketing*, dan foto produk. Sebab seiring *go digitalisasi*, para pedagang perlu menyesuaikan diri. Agar tak hanya bertahan menjual secara *offline*, tetapi juga *online*. Selain itu, materi literasi keuangan dan permodalan juga diberikan.

Setelah pelatihan, mereka tak sekedar dilepas. Melainkan masih didampingi oleh mentor selama dua pekan ke depan. "Sehingga manajemen penjualannya akan semakin baik, dalam pelayanan mereka juga ramah bisa menyapa pengunjung," ungkapnya Selasa (22/11).

"Hingga menata display, menetapkan harga, dan kualitas produk. Mereka di TM 1 harus punya ciri khas dan *branding* sendiri. Sehingga akan membuat pengunjung kangen datang ke Teras Malioboro," sambungnya.

Latar belakang dari pelatihan, lanjut Hellen, karena *tenant* yang dulu berada di sepanjang trotoar Jalan Malioboro belum pernah tersentuh oleh pendampingan. Serta belum mendapatkan legalitas



FOTO-FOTO: WINDA ATIKA IRA P / RADAR JOGJA

ANTUSIAS: Pedagang dari 60 *tenant* di Teras Malioboro 1 saat mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan *entrepreneurship* Selasa (22/11).

seperti nomor induk berusaha (NIB) yang wajib bagi pedagang.

Dengan pelatihan ini, setidaknya mereka memiliki peluang besar untuk lebih maju dan berkembang dalam berbisnis. Bukan berarti mereka dilupakan. Justru akan dikembangkan menjadi lebih baik dengan berbagai pendampingan maupun kegiatan promosi. Terlebih sudah difasilitasi tempat yang memadai. "Kami mengubah *mindset* mereka, jangan mereka beranggapan bahwa ini ancaman. Agar mereka keluar dari zona itu," harapnya.

"Padahal kami akan lebih meng-*uwong*-kan mereka, karena saat mereka pindah ke sini, kenyamanan dan fasilitas jauh lebih besar dibanding saat di sepanjang jalan,"

sambungnya.

Sejauh ini, 800 *tenant* sudah memproses NIB 100 persen. Pun mengikuti mereka sertifikasi halal khusus *tenant* kuliner. Selain itu, sekitar 80 persen atau 500 *tenant* sudah beralih menggunakan metode *cashless* pembayaran nontunai menggunakan QRIS.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Sri Nurkyatsiwi mengatakan, ada 800 *tenant* di TM 1. Namun karena peserta pelatihan dibatasi, diharapkan 60 orang terpilih bisa menjadi virus. Sehingga menularkan ilmu yang diperoleh kepada *tenant* lain. "Mari kita sama-sama bangun Teras Malioboro menjadi rumah yang istimewa," harapnya. (***/wia/eno/by**)

INFO MONEV TEMPAT IBADAH



ATENSI PEMERINTAH DAERAH: Anggota Komisi D DPRD DIY Ika Damayanti Fatma Negara mengadakan monev tempat ibadah di Masjid Al-furqon Gendhu, Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo, kemarin. Dia menilai rohani merupakan pondasi yang harus dibangun sejak dini.

Monitoring Evaluasi Tempat Ibadah di Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo

Mental Spiritual, Kebutuhan Rohani Harus Dibangun sejak Dini

Anggota Komisi D DPRD DIY Ika Damayanti Fatma Negara mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) tempat ibadah. Dia mengadakan dialog dengan sejumlah pengurus masjid dan musala yang menerima hibah. Dialog dilakukan di Masjid Al-Furqon Gendhu RT 102 RW 24 Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo.

"KAMI datang ke sini juga dalam rangka silaturahmi," ujar Ika kemarin (23/11).

Hibah tempat ibadah diajukan melalui proposal. Ditujukan kepada gubernur DIY. Hibah yang bersumber dari APBD DIY TA 2022. Dia menjelaskan, hibah tempat ibadah diajukan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD DIY. Hibah direalisasikan melalui Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.

Tentang kegiatan monev tempat ibadah, Ika menjelaskan selaras dengan fungsi dewan. Di samping punya fungsi legislasi dan anggaran, dewan juga punya fungsi pengawasan. Monev itu bertujuan menjalankan fungsi ketiga dewan.



ISTIMEWA

"Kami cek langsung ke lapangan dan ternyata hibah diterima utuh. Sesuai peruntukan sebagaimana proposal yang diajukan," katanya.

Hibah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Di antaranya membangun atau merenovasi fasilitas masjid atau musala. Hibah juga dapat digunakan membeli karpet dan pengeras suara. Juga fasilitas lain demi menunjang kegiatan ibadah umat.

Ika menilai hibah tempat ibadah merupakan perhatian Pemda DIY terhadap kehidupan beragama masyarakat. Fasilitas itu patut diapresiasi. Dengan semakin khidmatnya umat beribadah, Ika

yakin berdampak terhadap pembangunan mental spiritual masyarakat. Sebab, mental spiritual sama dengan membangun jiwa. Kebutuhan dasar manusia yang harus dibangun sejak dini.

"Rohani adalah pondasi. Tempat ibadah menjadi bagian dari upaya membangun rohani," katanya.

Dia berharap hibah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan adanya hibah, kehidupan beragam masyarakat di Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo semakin baik. Masjid semakin makmur. "Umat yang ke masjid semakin banyak. Ibadah semakin khidmat," harapnya. (**tom/kus/by**)